

Judul : Polemik AMDK, eksploitasi air tanah merusak lingkungan
Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Polemik AMDK Eksplotasi Air Tanah Merusak Lingkungan

KOMISI VII DPR mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi perizinan pengambilan air tanah. Hal ini merupakan buntut polemik sumber air yang digunakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) yang disebut berasal dari air tanah dan bukan dari mata air pegunungan seperti yang diklaim dalam promosinya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan, pihaknya lebih fokus pada persoalan lingkungan. Karena, akan ada persoalan yang muncul akibat kegiatan industri yang mengambil air dalam jumlah besar.

Dia menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi soal sejumlah warga dan petani yang mengeluh kekeringan dan keterbatasan air bersih di sekitar area pabrik. Kondisi itu menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri air kemasan.

"Agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," kata Chusnunia saat rapat dengan sejumlah produsen air minum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menyampaikan, beberapa riset yang menyebut penurunan debit air di sekitar pabrik air minum adalah isu lingkungan serius. Hal tersebut disebabkan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Dia meminta perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan.

"Agar kegiatan industri yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan lingkungan," tegas legislator Fraksi PKB itu.

Dia mengingatkan, hal ini harus menjadi concern bersama. Pasalnya, pengambilan air dalam jumlah besar secara terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan lapisan pembawa air atau akuifer di area sekitarnya. "Belum lagi dampak lanjutan seperti sampah plastik," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menambahkan, pihaknya akan mempercepat pembentukan Panitia Kerja (Panja) AMDK guna memperkuat tata kelola dan pengawasan industri air minum nasional. Langkah ini juga disambut positif pelaku industri.

Panja AMDK, kata Evita, akan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki tata kelola industri, memastikan keberlanjutan sumber daya air, serta melindungi kepentingan konsumen. "Panja akan merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK," kata Evita.

Komisi VII, lanjutnya, juga mendesak para produsen AMDK untuk terbuka kepada publik mengenai sumber air yang mereka gunakan. Kejelasan dan transparansi dinilai penting agar masyarakat tidak merasa dibohongi dan tetap memiliki kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran. ■ **PYE**